KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Panglima diminta tak ragu hadapi KKB
Tanggal : Selasa, 12 Maret 2019
Surat Kabar : Republika
Halaman : 2

Panglima Diminta tak Ragu Hadapi KKB

● ARIF SATRIO NUGROHO, RONGGO ASTUNGKORO

JAKARTA — Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto tidak ragu menghadapi kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Bamsoet meminta TNI menerjunkan kekuatan penuh.

"Sudah saya katakan bahwa harus dilakukan dengan kekuatan penuh, jadi jangan tanggung-tanggung," kata Bamsoet di Kompleks DPR, Jakarta, Senin (11/3).

Bamsoet mengaku telah meminta Komisi I DPR mendesak Panglima TNI agar menambah pasukan. Komisi itu membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi, informatika, dan intelijen.

"Saya serahkan sepenuhnya pada Komisi I membicarakan dengan Panglima TNI dan menurut saya langkah-langkah tegas sangat diperlukan saat ini agar tidak berlarut-larut peristiwa atau kelompok bersenjata ini beroperasi," kata Bamsoet.

Pada Kamis (7/3), KKB menyerang pasukan TNI di Kabupaten Nduga, Papua. Akibatnya, tiga orang prajurti TNI gugur dan sekitar tujuh orang anggota KKB tewas. Tiga prajurit yang gugur adalah Serda Mirwariyadin, Serda Siswanto Bayu Aji, dan Serda Yusdin.

Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel Infanteri Muhammad Aidi mengaku belum mengetahui apakah akan ada operasi khusus setelah kasus tersebut. Aidi mengaku semua bergantung pada pemerintah. "Sebenarnya kalau keputusan politik memungkinkan ini sebenarnya ada operasi pemberantasan separatis sesuai dengan UU 34," kata Aidi.

Sayangnya, kata Aidi, pemerintah masih belum mau menyebut kelompok tersebut sebagai kelompok separatis. Pemerintah masih menyebutkan dengan KKB sehingga meminimalisasi peran penindakan TNI.

Pada Jumat (8/3), Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengakui nama KKB menjadi salah satu kendala TNI menyelesaikan masalah tersebut. Ia pun mendesak adanya pembahasan nama itu oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, maupun Menteri Luar Negeri.

"Jangan terus pembatasan-pembatasan itu mengorbankan prajurit. Berapa prajurit jadi korban, beberapa saat lalu korban, sekarang korban lagi," kata dia. Menurut dia, KKB lebih baik disebut sebagai kelompok separatis sehingga mempermudah TNI melakukan penumpasan.

Saling bantah

Terjadi kesimpangsiuran data terkait kejadian pada Kamis tersebut. KKB membatah terkait adanya anggota mereka yang tewas. Sementara itu, Aidi mengaku tujuh korban dari KKB telah dibawa rekan-rekannya yang kabur dalam hutan.

Menanggapi hal tersebut, Aidi mengakui adat masyarakat Papua membuat TNI sulit membuktikan adanya korban dari pihak KKB. Menurut dia, di Papua, terutama daerah di pegunungan, punya tradisi membakar mayat yang meninggal karena pertikaian.

"Mereka (KKB) tidak mengakui ada korban dari mereka dan jelas tidak bisa dibuktikan karena orang Papua ini, terutama di pegunungan itu, punya tradisi adat apabila ada korban karena perang itu langsung dibakar mayatnya," ujar Aidi.

Aidi menjelaskan, mayat korban perang atau pertikaian dibakar karena dianggap membawa malapetaka. Mayat korban pertikaian itu pun tidak boleh dibiarkan lama-lama karena alasan yang sama. Cara tersebut berbeda dengan mayat yang meninggal karena sakit. "Kalau meninggal karena sakit dikubur seperti biasa," katanya. ■ **ed:** ilham tirta